

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Isu mengenai keterbukaan informasi publik dalam dua tahun kebelakang ini ramai dibicarakan, pada puncaknya yaitu diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau disingkat UU KIP.

UU KIP ini telah disahkan pada tanggal 1 Mei 2010, seiring itu pula kasus-kasus yang berkenaan dengan UU KIP ini menyeruak ke permukaan, misalnya saja pengalaman yang dialami Fajar Yanuar, 27, seperti yang dikutip oleh koran harian umum Media Indonesia (Jumat, 14 Oktober 2011) yang menyebutkan bahwa:

Pegawai swasta di Jakarta asal Bandung itu mengaku kebingungan saat harus mengurus KTP baru untuk wilayah Jakarta. “*Gak* jelas, katanya gratis, tapi ada yang bilang untuk mengurus KTP di Jakarta biayanya minimal di atas Rp 100 ribu. Ada juga yang bilang cuma Rp 25 ribu. Sudah tanya ke pengurus kelurahan tapi informasinya simpang siur,” papar Fajar. Fajar tidak tahu bahwa dengan diberlakukannya UU KIP sejak setahun lampau, dirinya berhak mendapat informasi yang jelas tentang berbagai kebijakan publik.

Selanjutnya yaitu kasus mengenai temuan tim peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) terkait susu formula yang diduga mengandung bakteri *Enterobacter Sakazakii* seperti yang diberitakan oleh koran harian umum Media Indonesia (Jumat, 14 Oktober 2011) yang menyebutkan bahwa:

“...hingga kini masyarakat tidak diberi tahu jenis dan merek susu apa saja yang terkena bakteri tersebut. Padahal, masyarakat berhak untuk mengetahui

hal tersebut karena produk susu tersebut dikonsumsi oleh kalangan umum. Kejadian itu menjadi salah satu fakta yang menunjukkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan informasi yang notabene bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.”

Beranjak dari salah satu contoh kasus tersebut maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan dan mengumumkan informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Hingga kini data mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat pada tahun 2011 telah mencapai 393 pemohon dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat Pada Tahun 2011**

Pemohon	Jumlah
LSM	90
Individu	303
<b>Jumlah</b>	<b>309</b>

*Sumber: Komisi Informasi Pusat (Media Indonesia 14, 9, 2011)*

Sesungguhnya perihal keterbukaan informasi publik ini tidak hanya terbatas pada pemerintah dalam arti luas saja seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, akan tetapi badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat atau berasal dari luar negeri.

Dalam pencapaian *good governance*, memang memerlukan peran serta masyarakat dalam upaya turut serta membantu pemerintah. Dalam hal ini Suriakusumah dan Bestari (2009: 320) menyatakan bahwa “partisipasi menyeluruh masyarakat dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan

mengemukakan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif”. Namun masyarakat yang dimaksud diatas tentu saja bukan masyarakat tradisional yang mempunyai pola pikir konvensional, akan tetapi cenderung kepada seperti yang dikemukakan oleh Budimansyah dan Suryadi (2008:55), yaitu “masyarakat yang mempunyai *civic knowledge* yang baik berkaitan dengan kandungan atau apa yang harusnya diketahui oleh warganegara”.

Masyarakat dalam perkembangan pada era sekarang ini adalah masyarakat yang menuju kepada era informasi, seperti yang diungkapkan Cogan (Syaifullah dan Wuryan, 2008:109) bahwa:

kehidupan bangsa pada abad 21 ini membawa dampak pada kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu; secara dramatis teknologi informasi akan mengurangi masalah privasi atau hak-hak individu dan secara dramatis pula, ketidakmerataan antara yang mempunyai akses kepada teknologi informasi dan yang tidak memiliki akses akan semakin meningkat.

Dari pernyataan Cogan tersebut kita bisa menganalisis bahwa perkembangan masyarakat pada abad ke-21 mengarah pada akses informasi yang dilakukan masyarakat, ini mengakibatkan berkurangnya masalah-masalah hak individu. Di lain pihak, kesenjangan akan terjadi antara masyarakat yang bisa mengakses informasi dengan masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi.

Berangkat dari UU KIP, sisi keterbukaan dalam kegiatan pemerintahan merupakan prinsip yang esensial dalam upaya pencapaian *good governance*. Dalam tataran di lapangan, implementasi *good governance* ini tidak bisa diterapkan dengan mudah, selalu saja ada rintangan dalam kenyataannya, terutama menyangkut kepada aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh pemerintahan.

Pemerintah Kota Bandung sejauh ini telah mengupayakan aksesibilitas informasi terhadap masyarakat melalui diadakannya *website* resmi pemerintah Kota Bandung, dengan harapan bahwa masyarakat bisa mendapatkan akses informasi mengenai pemerintah Kota Bandung dengan mudah. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.

Hal ini diperkuat pula dengan hasil *polling* sementara yang diadakan oleh *website* resmi Kota Bandung yaitu; [www.bandung.go.id](http://www.bandung.go.id),

**Tabel 1.2**  
**Polling Pendapat Masyarakat Terhadap Penyampaian Informasi**  
**Pemerintah Kota Bandung Melalui Website**



Sumber: [www.bandung.go.id](http://www.bandung.go.id) ; diakses tanggal 18 April 2011

Dari hasil sementara *polling* diatas terlihat bahwa masyarakat Kota Bandung yang mengakses internet saja belum cukup puas dengan penyampaian informasi yang disediakan oleh *website* tersebut. Jika demikian, apalagi dengan masyarakat yang belum bisa mengakses *website*, dikhawatirkan masyarakat Kota Bandung

tidak akan mengetahui informasi publik yang *publish* oleh pemerintah Kota Bandung, terutama mengenai pelayanan masyarakat mengenai Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah.

Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) ini merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung lewat BPPT atau Badan Perizinan Pelayanan Terpadu. Informasi mengenai Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) ini sudah tersedia di internet.

Asumsi ini didukung dengan realitas bahwa penduduk Kota Bandung pada tahun 2008 sejumlah 2.510.982 jiwa (Wikipedia, 2011). Prediksi perbandingan antara masyarakat yang bisa mengakses informasi publik lewat internet dengan populasi penduduk di Kota Bandung bisa dilihat dari tabel di bawah;

**Tabel 1.3**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Bandung Dengan Pengunjung Website Dari Hasil Polling Sementara**

Jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2008	Total pengunjung internet dari hasil <i>polling</i> sementara	Rata-rata pengunjung per-jam
2.510.982	330	20

*Sumber: Diolah penulis (2011)*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya sebagian kecil masyarakat saja yang bisa mendapatkan informasi publik mengenai Kota Bandung lewat *website*.

Di sisi lain, sosialisasi yang sudah dilakukan pemerintah Kota Bandung pada setiap kecamatan di seluruh Kota Bandung mengenai keterbukaan informasi publik sebagai implementasi dari UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik menjadi hal pendukung terhadap peneliti untuk melakukan

penelitian ini.

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Yuyus Suhaya selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bandung, bahwa seluruh kecamatan di Kota Bandung telah dilakukan sosialisasi mengenai UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, pemerintah Kota Bandung juga telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas pula pada setiap kecamatan di seluruh Kota Bandung melalui Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 065.1/Kep.853-DisKomInFo/2011.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Mengenai Pelayanan Masyarakat di Kota Bandung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Seberapa tinggi keterbukaan informasi publik dalam hal pelayanan masyarakat di pemerintahan Kota Bandung menurut persepsi masyarakat Kota Bandung?
2. Seberapa tinggi aksesibilitas informasi publik dalam hal pelayanan masyarakat mengenai Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dari pemerintah Kota Bandung terhadap masyarakat Kota Bandung?

3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan transparansi informasi publik dalam hal pelayanan masyarakat mengenai Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) di Kota Bandung?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Kota Bandung dalam hal ini adalah masyarakat yang diambil sampelnya secara *random* dari enam wilayah, yaitu; wilayah Bojonegara, wilayah Tegallega, wilayah Karees, wilayah Cibeunying, wilayah Gedebage, dan wilayah Ujung Berung.
2. Keterbukaan informasi publik dalam hal ini adalah dalam hal pelayanan masyarakat dalam hal Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT)
3. Informasi publik dalam hal ini adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dan dikelola oleh pemerintah Kota Bandung
4. Aksesibilitas informasi publik dalam hal ini adalah kemudahan untuk memperoleh informasi publik dalam berbagai media (televisi, radio, surat kabar, internet, atau yang lainnya) dari pemerintah Kota Bandung.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, maka beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui seberapa tinggi keterbukaan informasi publik dalam hal pelayanan masyarakat di pemerintahan Kota Bandung menurut persepsi masyarakat Kota Bandung?

2. Mengetahui seberapa tinggi aksesibilitas informasi publik dalam hal pelayanan masyarakat mengenai Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dari pemerintah Kota Bandung terhadap masyarakat Kota Bandung
3. Mengetahui bagaimana solusi yang dapat dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan transparansi informasi publik dalam hal pelayanan masyarakat di Kota Bandung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoretis

Penelitian ini bermanfaat dalam rangka pengembangan teori-teori dan konsep-konsep mengenai persepsi masyarakat Kota Bandung mengenai keterbukaan informasi publik dalam hal pelayanan masyarakat di pemerintahan Kota Bandung.

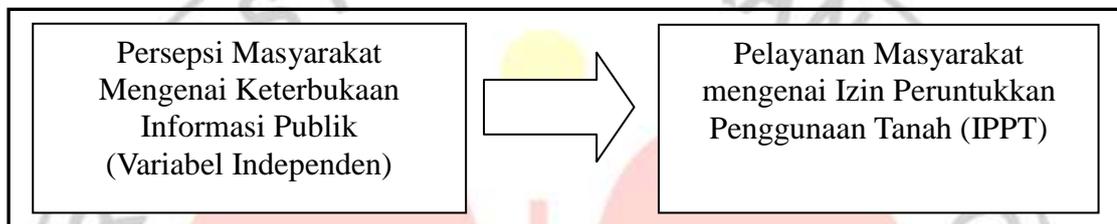
##### 2. Manfaat praktis

- a. Diketuainya aksesibilitas informasi publik dalam hal pelayanan masyarakat mengenai Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) dari pemerintah Kota Bandung terhadap masyarakat Kota Bandung
- b. Dapat dipahaminya persepsi masyarakat Kota Bandung terhadap keterbukaan informasi publik dalam hal pelayanan masyarakat mengenai Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) di pemerintahan Kota Bandung
- c. Diketuainya solusi yang dapat dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan transparansi informasi publik dalam hal pelayanan masyarakat di Kota Bandung

## F. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen. Menurut Sugiyono (2010 : 38), “variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”

**Skema 1.1**  
**Variabel Penelitian**



*Sumber: Diolah penulis (2011)*

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam mengartikan istilah-istilah yang digunakan untuk menata konsep di dalam penelitian ini, maka istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini akan ditafsirkan secara operasional sebagai berikut:

### 1. Persepsi

Menurut Walgito (2002: 69), “persepsi merupakan proses yang dilalui oleh suatu stimulus yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diinderanya itu”. Sementara itu masih mengenai persepsi, Supardan (2008 : 473) mengemukakan mengenai persepsi bahwa: “persepsi mengacu kepada mekanisme yang menjadi alat kita menyadari dan memproses informasi tentang stimuli ataupun dunia eksternal, baik

itu yang menyangkut kualitas kognitif maupun afektif". Di lain pihak, Mangkunegara (2008: 14) menyatakan bahwa "persepsi adalah suatu proses menyeleksi stimulus dan diartikan. Dengan kata lain persepsi merupakan suatu proses pemberian arti atau makna terhadap suatu objek yang ada pada lingkungan".

## 2. Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat (1979: 146), "masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang merasa terikat oleh suatu rasa identitas bersama".

Di lain pihak Shadily dan Soekanto dalam Supardan (2008: 136) mengartikan masyarakat sebagai golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan merupakan sistem sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain.

## 3. Kota Bandung

Kata "Bandung" berasal dari kata *bandung* atau *bandungan* karena terbandungnya sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama "Bandung" diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut *perahu bandung* yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibukota yang lama di Dayeuhkolot (Wikipedia, 2011 [[http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bandung](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung)]).

Menurut Wikipedia (2010) “Kota Bandung merupakan Kota metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus menjadi ibu Kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan Kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya”.

#### 4. Keterbukaan

Menurut *website* Think Quantum (2009), “keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas”.

(online.[Tersedia di <http://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/02/keterbukaan-dan-keadilan-dalam-pemerintahan/>]). Dengan kata lain, keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

#### 5. Informasi publik

Pasal 1, UU. No 14 Tahun 2008 Tentang KIP tertulis bahwa:

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1, UU. No 14 Tahun 2008 Tentang KIP).

Jadi, dalam hal ini yang dimaksud dengan informasi publik adalah segala bentuk informasi yang dimiliki oleh suatu badan publik, informasi ini bersifat terbuka untuk umum.

#### 6. Pelayanan Masyarakat

Thoah dalam Sedarmayanti (2009: 243) mengartikan pelayanan masyarakat sebagai: “usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau

instansi tertentu untuk memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan”. Dalam pengertian ini Toha lebih menekankan bahwa sebuah pelayanan yang dilakukan pemerintah haruslah mengutamakan kemudahan bagi masyarakatnya.

## H. Hipotesis

Menurut Sugiyono, (2010: 64) “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Di sisi lain, Prasetyo dan Jannah (2010: 76) juga mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan hipotesis yaitu “proposisi yang akan diuji kebenarannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian”.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis deskriptif, Sugiyono (2010: 67) mengemukakan bahwa “hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri”. Berdasarkan hal di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho:  $\mu$  : Keterbukaan informasi publik mengenai pelayanan masyarakat yang terdapat di pemerintahan Kota Bandung tidak lebih dari 75% .

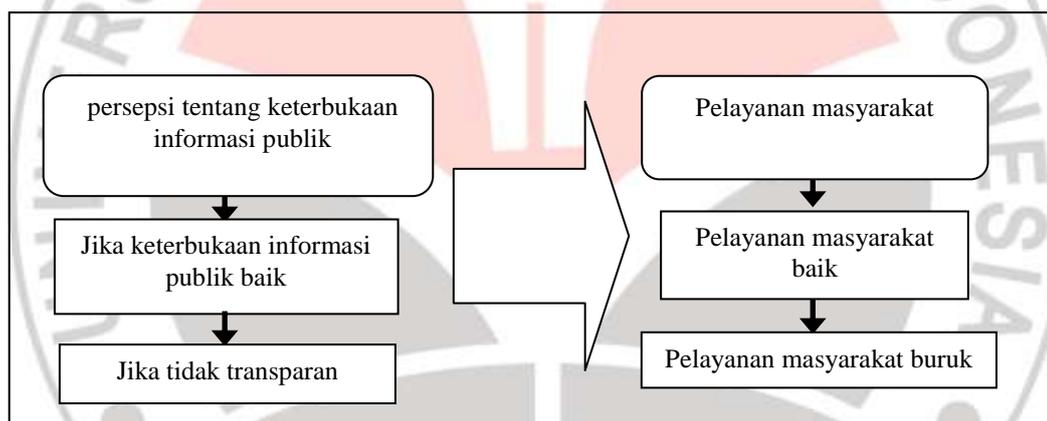
Ha:  $\mu$  : Keterbukaan informasi publik mengenai pelayanan masyarakat yang terdapat di pemerintahan Kota Bandung lebih dari 75% .

## I. Kerangka Berpikir

Sekarang dalam Sugiyono (2010: 60) mengemukakan bahwa ‘kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting’.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah; “jika masyarakat Kota Bandung kurang mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai pelayanan masyarakat, maka masyarakat Kota Bandung akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan masyarakat”.

**Skema 1.2**  
**Kerangka Berpikir**



*Sumber: Diolah penulis (2011)*

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian survei karena ingin mendapatkan data tertentu yang berasal dari masyarakat untuk selanjutnya diolah menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010: 4), “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Sugiyono (2010: 6) menjelaskan bahwa metode penelitian survei bersifat alamiah, seperti dikemukakannya:

metode survei digunakan untuk mendapatkan data tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen).

Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan survei ke tempat lokasi penelitian dengan menggunakan metode atau pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif bersifat positivistik. Sugiyono (2010: 8) mengartikan metode kuantitatif sebagai berikut:

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan

Dengan metode kuantitatif, diharapkan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan di atas bisa terjawab.



Sidik Alam Nuari, 2012

Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Mengenai Pelayanan Masyarakat Di Kota Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)